

Judul : Garap rantai pasok lokal, KDMP bisa jadi motor penggerak ekonomi
Tanggal : Sabtu, 18 Juli 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Garap Rantai Pasok Lokal

KDMP Bisa Jadi Motor Penggerak Ekonomi

KOMISI VI DPR mendorong Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dikembangkan berdasarkan potensi unggulan di setiap daerah. Koperasi tidak boleh diseragamkan hanya sebagai unit simpan pinjam atau toko ritel, tetapi harus mampu menjadi motor penggerak bagi ekonomi lokal.

Anggota Komisi VI DPR Subardi mengatakan, kehadiran KDMP merupakan bentuk nyata peran negara dalam membangun koperasi sebagai amanat konstitusi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sehingga pengembangan koperasi harus disesuaikan dengan karakteristik dan sumber daya yang dimiliki setiap wilayah.

Dia mencontohkan, di Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta memiliki potensi alam berupa batu kapur. Karena itu, KDMP lebih tepat diarahkan untuk mengelola potensi batu kapur menjadi produk bernilai tambah dibanding sekadar menjual bahan mentah. Tujuannya agar lebih manfaat dan berkembang serta dirasakan oleh masyarakat.

"Jadi bukan hanya menjual batu gelondongan tapi diolah menjadi satu bahan yang diperlukan, seperti untuk pupuk atau

kosmetik dan sebagainya," saran politisi Nasdem ini.

Ia menilai, pendekatan berbasis potensi lokal akan membuat KDMP lebih berdaya saing, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat perekonomian desa secara berkelanjutan. Dengan itu, Pemerintah diminta melakukan pemetaan potensi di setiap daerah agar KDMP menjadi penggerak ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan dan keunggulan masing-masing wilayah.

"Keberadaan KDMP ini merupakan peran negara dalam membangun koperasi sesuai amanat konstitusi yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat," imbuh legislator asal Yogyakarta ini.

Anggota Komisi VI DPR Kawendra Lukistian menambahkan, KDMP harus dikembangkan sebagai institusi ekonomi di tingkat desa, juga menjadi bagian dari rantai pasok nasional yang mampu menopang ketahanan ekonomi Indonesia. Karena itu, koperasi harus memiliki peran yang lebih strategis dalam sistem distribusi nasional.

"Presiden Prabowo telah menghadirkan kembali semangat berkoperasi di era ini. Jadi KDMP ke



Subardi

depannya bukan hanya sekadar menjadi toko di desa-desa tertentu, tetapi menjadi rantai pasok yang dimiliki oleh negara," ujar Kawendra di Jakarta, Kamis (16/7/2026).

Kawendra menilai, penguatan rantai pasok melalui koperasi akan mengurangi ketergantungan terhadap distribusi yang selama ini lebih banyak dikuasai sektor swasta. Sehingga Pemerintah memiliki instrumen yang lebih kuat untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Mudah-mudahan dengan ran-

tai pasok yang lebih dan dimiliki negara, harga bisa terkontrol dan dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat," harap politisi Gerindra ini.

Selain itu, ia meminta agar pengelolaan KDMP melibatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dari daerah setempat untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Harapannya agar mereka tidak perlu jauh-jauh mencari pekerjaan. "Keterlibatan masyarakat lokal juga akan membuka lapangan kerja baru sekaligus memperkuat ekonomi desa," harap dia.

Kawendra juga meminta adanya pengawasan yang kuat terhadap pelaksanaan program KDMP. Caranya, Kementerian Koperasi (Kemkop) membangun sistem pengawasan digital yang mampu memantau perkembangan koperasi secara menyeluruh melalui *dashboard* dan *early warning system*.

Tujuannya agar berbagai persoalan dapat segera dimitigasi. "Ini berkaitan dengan harapan rakyat, sehingga program ini harus benar-benar optimal dan tidak hanya berjalan dua tahun," harap dia.

Dia mengapresiasi capaian sekitar 6.600 lebih KDMP yang telah berhasil masuk ke dalam rantai distribusi nasional. Namun, jumlah tersebut harus terus bertambah sehingga koperasi tidak hanya menjadi pemasok Program Makan Bergizi Gratis (MBG), tetapi juga menjadi mitra strategis bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "Dengan begitu ekonomi rakyat betul-betul semakin kokoh karena kita memiliki target yang jelas," kata legislator asal Jawa Timur (Jatim) ini.

Sementara itu, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan, pihaknya telah menyusun pembangunan jangka panjang dan penguatan kapasitas SDM KDMP dengan berbagai buku saku model bisnis dan 10 modul pelatihan. Apalagi penguatan kapasitas SDM menjadi prioritas lembaganya.

"Saat ini lebih dari 15 ribu pendamping KDMP, 143 ribu pengurus KDMP, dan 206 ribu SDM koperasi telah mengikuti berbagai program pelatihan untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas tata kelola koperasi," ujar Ferry di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (15/7/2026). ■ TIF